

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 614K/PID.SUS/2014)**

SKRIPSI

Oleh:

ERI ANGGA PERMANA

201310117031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Eri Angga Permana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310117031

Program Studi/ Program : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Februari 2019



Pembimbing I

Yulianto Syahyu,SH.,MH.
NIP : 011606053

Pembimbing II

Anggreany Haryani Putri,SH., MH
NIP : 1712307

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Eri Angga Permana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001310117031

Program Studi/ fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Pembimbing I

Yulianto Syahyu,SH.,MH.
NIP : 011606053

Pembimbing II

Anggreany Haryani Putri,SH., MH
NIP : 1712307

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Eri Angga Permana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310117031

Program Studi/ Program : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Februari 2019

Bekasi, 9 Februari 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, SH.,MH.

NIP : 201805008

Penguji I : Dr. Amalia Syauket,SH.,M.Si.

NIP : 11712072

Penguji II : Panti Rahayu, SH.,MH.

NIP : 11606047

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

NIP : 1712307

Dekan Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, SH.,M.Si.,LLM.,Ph.D

NIP : 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : E. ANGGA PERMANA
NPM : 201310117031
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Bhayangkara maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bekasi, Januari 2019



Eri Angga Permana

MOTO

“ Ilmu mah Moal Berat Dibabawa, Mangkana Kudu Nyiar Ilmu Sing Luhur.”

(ayahanda Alm.Yayat S.)

“Ilmu Itu Tidak Berat Untuk Dibawa, Oleh Karena Itu Haruslah Menuntut Ilmu Setinggi- Tingginya”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014) ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.

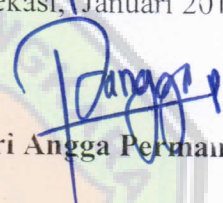
Penulis menyadari bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, Drs, SH, MM. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, SH, M.Si, LL.M, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Bapak Yulianto Syahyu, SH.,MH. Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Ibu (Alm) Istiqomah, SH.,MH. pembimbing II yang pada pada saat penulis menyelesaikan skripsi ini telah meninggal dunia, dimana almarhumah selama menjadi pembimbing telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Amal ibadah Almarhumah diterima di sisi-Nya. dan kemudian digantikan oleh Ibu Anggreany Haryani Putri, SH, MH selaku Pembimbing II
5. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH, MH. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi

6. Keluarga Hesty Dhamayanti S.Pd dan kedua anak; Ghazi Asshaadan Rangga Bhakti dan Ghaziya Khadeejah Arroyyan.
7. Para Dosen di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Teman-teman di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bekasi, Januari 2019


Eri Angga Permana



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eri Angga Permana
NPM/NIP : 201310117031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 614K/PID.SUS/2014)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 11 Februari 2019

Yang Menyatakan,



(Eri Angga Permana)

ABSTRAK

E. Angga Permana, 201310117031, pelaksanaan Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi berdasarkan study kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 614k/pid.sus/2014, adalah untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut sudah sesuai dengan perundangan- undangan yang berlaku apabila dihubungkan dengan kondisi *force majeure* dan bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah terjadi di dinas Binamarga dan Tata Kota di Kota Bekasi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bawasannya tidak semua masalah kesalahan prosedur atau administrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah masuk ke ranah hukum Pidana namun bisa diselesaikan secara hukum Perdata.

Kata Kunci : Korupsi, Penerapan Hukum, Pengadaan barang dan jasa.

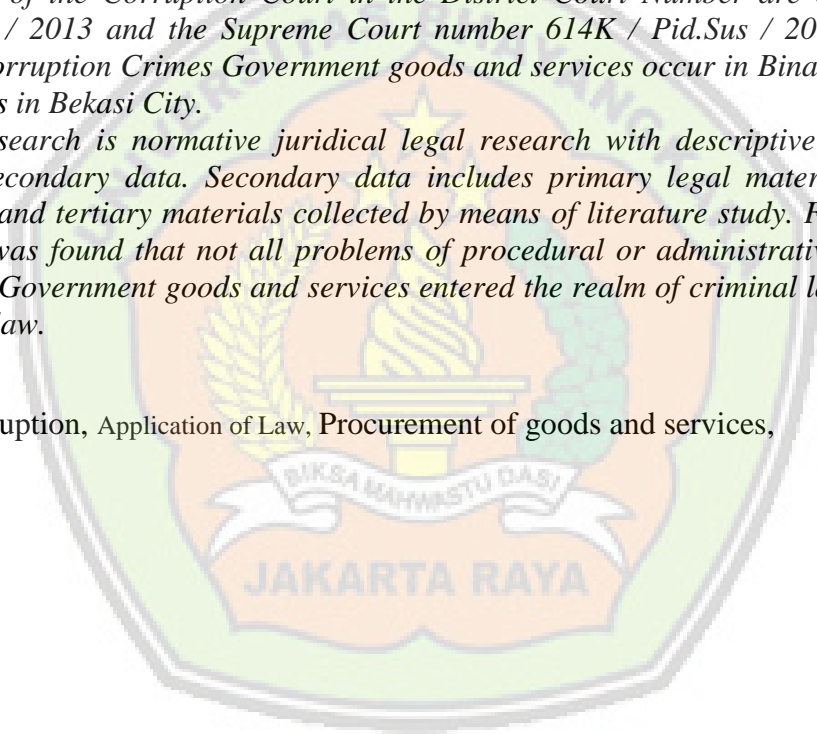
ABSTRACT

E. Angga Permana, 201310117031, *implementation of the legal application of perpetrators of corruption in the administration of goods and services based on Law Number 20 of 2001 concerning corruption*

This study examines how the implementation of the law applies to perpetrators of corruption in government goods and services based on Law Number 20 of 2001 amendments to Law No. 31 of 1999 concerning corruption based on a case study of the decision of the Supreme Court Number 614k / pid .us / 2014, is to describe whether the implementation of the law against the perpetrators of corruption in the procurement of government goods and services is in accordance with the applicable legislation if it is associated with force majeure conditions and how the judges of the Corruption Court in the District Court Number are compared. 14 / PD.SUS / TPK / 2013 and the Supreme Court number 614K / Pid.Sus / 2014 for cases of Procurement Corruption Crimes Government goods and services occur in Binamarga and City Planning Offices in Bekasi City.

This type of research is normative juridical legal research with descriptive characteristics derived from secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature study. From the results of the study it was found that not all problems of procedural or administrative errors in the procurement of Government goods and services entered the realm of criminal law but could be settled by Civil law.

Keywords: Corruption, Application of Law, Procurement of goods and services,



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER DALAM | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | v |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| LEMBAR PUBLIKASI | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran..... | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 14 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Teori-teori Tentang Negara Hukum..... | 17 |
| 2.2 Teori Pemerintahan yang Baik..... | 21 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum..... | 24 |

BAB III HASIL PENELITIAN

- 3.1 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung Nomor 614K/Pid.Sus/2014 Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah..... 43
- 3.1 Penerapan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi pada pengadaan barang tahun anggaran 2010 berdasarkan Undang undang nomor 20 tahun 2001 81

BAB IV PEMBAHASAN

- 3.1 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung Nomor 614K/Pid.Sus/2014 Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah..... 87
- 3.1 Penerapan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi pada pengadaan barang tahun anggaran 2010 berdasarkan Undang undang nomor 20 tahun 2001 109

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan 127
- 5.2 Saran 128

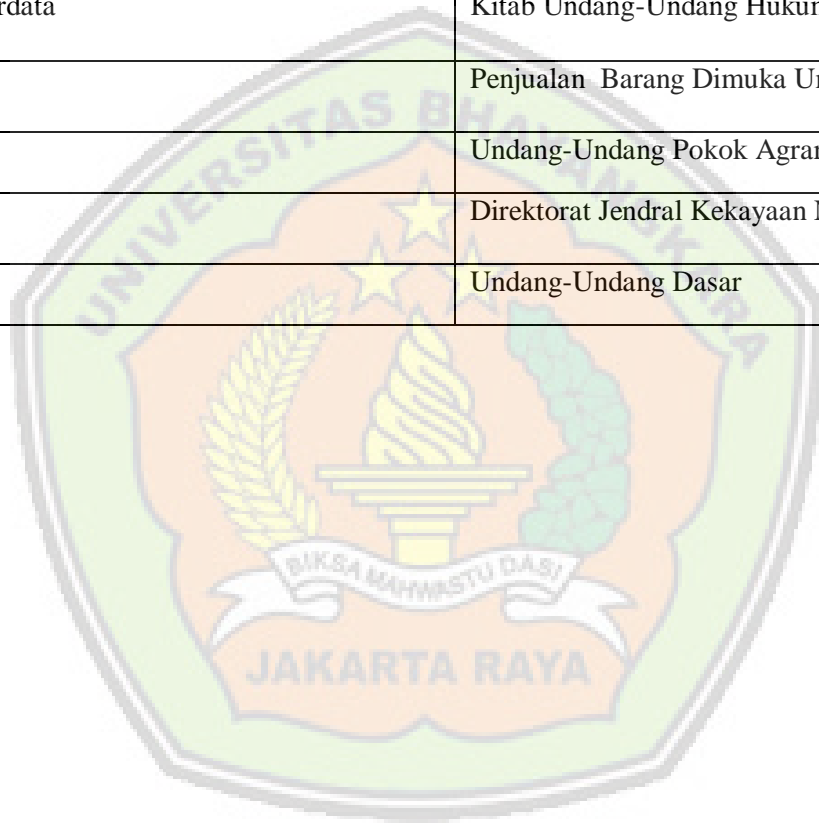
DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan |
|-------------------|------------------------------------|
| BW | Burgelijk Wetboek |
| HIR | HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT |
| KUHPerdata | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| Lelang | Penjualan Barang Dimuka Umum |
| UUPA | Undang-Undang Pokok Agraria |
| DJKN | Direktorat Jendral Kekayaan Negara |
| UUD | Undang-Undang Dasar |



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Putusan

LAMPIRAN II

Lembar Konsultasi

LAMPIRAN III

Riwayat Hidup Mahasiswa

